

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Safitri, Myma , Luluk Uliyah, *Adat Di Tangan Pemerintah Daerah : Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta : Epistema Institute.

Arizona, Yance dkk. 2010. *Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Kertas Kerja Epistema No.05/2001, Jakarta: Epistema Institute.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Atmosudirjo, S. Prajudi. 1995. *Hukum Aministrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Dwipayana, AAGN Ari, Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta : IRE Press.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depertemen Dalam Negeri, 2007, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*.

Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru: Ide Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta : Kementrerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Foucault, Michel. 2002. *The Subject and Power*, Michel Foucault: *Essential Works of Foucault, 1954-1984*, Vol. 3. James Faubion, edt. Harmondsworth:Penguin.

Gunawan, Jamil dkk. 2005. *Desentralisasi, Globalisasi, dan demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES.

HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Honeth, Axel 1996. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*. Cambride Polity.

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang : Setara Press.

Huda, Ni'matul. 2013. *Otonomi Daerah Filosofi, sejarah perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

HuMa. 2006. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta : HuMa

J.Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta : Rieneke cipta.

Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah*.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014. *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 : Buku II Prioritas Pembangunan Bidang*

Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta : LPFE UI

M. Hadjon, Philipus. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Gadjah mada University Press.

MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indinesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

MD, Mahfud 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES Indonesia.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta : Polgov Fisipol UGM.

Ndraha, Taliziduhu. 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ndrah, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rieneke Cipta.

P. Siagian, Sondang. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Policy Brief, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID. 2007. *Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*.

Saukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukriono, Didik. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi:Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi,Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Jakarta : Setara Press.

Sinamo, Nomensen. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Jala Permata Aksara.

Sudjatmiko, Budiman, Yando Zakaria. 2015. *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Yogyakarta : Pustaka Yustitia.

Suwandi, Made. 2002. *Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Demokratis dan Efisien*. Jakarta : Ditjen Otda Departemen dalam Negeri.

Syafrudin, Ateng, Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa*. Bandung : Alumni.

Syamsuddin, Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI Press.

Taylor, Charles. 1994. *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*, New Jersey. Princenton University Press.

Utomo, Warsito. 2006. *Kajian Kritis RUU Pemerintahan Daerah dan Implikasinya terhadap Tata Pemerintahan Yang Demokratis : Dalam Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan YAPIKA dan Forum LSM DIY.

Utang Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.

Wignosubroto, Soetandyo, dkk. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah:Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta : Institute for Local Development dan Yayasan Tifa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota

C. Jurnal, Makalah, Laporan, Website

Dzunuwanus Ghulam Manar. 2008. *Otonomi Daerah dalam Kerangka Sumber Daya Manusia di Antara Harapan dan Kenyataan*. Semarang.

Hanif Nurcholis. 2014. *Tinjauan Kritis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, makalah yang disampaikan pada prosiding Simposium Nasional Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara IV *Otonomi Desa dalam Konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa* di Universitas Udayana Bali pada 18-19 September 2014.

Kushandajani, *Desa Entitas yang Sering terlupakan: Makna Otonomi Desa dari Legal Positivisme menuju Legal Hermeneutics*, makalah yang disampaikan pada prosiding seminar *legal hermeneutics* sebagai alternatif kajian hukum tanggal 24 November 2007 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Laporan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Desember 2013.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. *Buku 1 Agenda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*.

Risalah Sidang Rapat Kerja I Rancangan Undang-Undang tentang Desa Tanggal 4 April 2012.

Risalah Sidang Rapat Kerja II Rancangan Undang-Undang tentang Desa Tanggal 15 Mei 2012.

Risalah Sidang Rapat Kerja IV Rancangan Undang-Undang tentang Desa Tanggal 11 Desember 2012.

Risalah Rapat Kerja PANSUS Pembahasan Cluster Dua RUU Desa mengenai Pentaan Desa, Kewenangan Desa, Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa dan Daftar Inventaris Masalah RUU Desa tanggal 22 Februari 2013.

Risalah Sidang PANSUS tentang Pemerintahan Daerah dan Desa Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 31 Mei 2012.

Risalah Sidang PANSUS tentang RUU Pemerintahan Daerah Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Tanggal 27 Juni 2012.

Risalah Sidang PANSUS Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum RUU Desa Tanggal 28 Juni 2012

Siti Zuhro, Opini Kolom Pakar pada Media Indonesia pada tanggal 22 September 2014 yang berjudul *Benang Kusut relasi Pusat-Daerah*

Sutoro Eko, 2012, *Kedudukan dan Kewenangan Desa GK*, pdf. hlm. 3-4 Diunduh pada 11 Mei 2015 pukul 9:20 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42046/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 14 Maret 2015 pukul 12:50 WIB.

<http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Rural&Village/SE-Papers/Kedudukan%20dan%20kewenangan%20Desa%20GK.pdf>

